



Implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan

Salsa Izza Shafinaz Sukardi^{1*}, Tauran², Tjitjik Rahaju³, Indah Prabawati⁴

¹⁻⁴ Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: salsa.22197@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *The agricultural sector is a vital pillar in maintaining food security and enhancing the livelihoods of rural communities. In an effort to improve agricultural productivity, the Government of Lamongan Regency, through the Food Security and Agriculture Agency (DKPP), has implemented the Agricultural Facilities and Infrastructure Provision and Development Program. This program is designed to strengthen agricultural production capacity by supporting the availability of farming machinery, improving irrigation networks, and developing farm access roads. Despite its strategic importance, the program's implementation continues to encounter various obstacles, including constrained budget availability, unequal distribution of agricultural facilities, reliance on rain-fed irrigation systems, substandard farm road infrastructure, and limited intensity of agricultural extension services. This research aims to examine the implementation of the Agricultural Facilities and Infrastructure Provision and Development Program in Sukodadi Village, Sukodadi District, Lamongan Regency. The study adopts a qualitative descriptive approach, utilizing data collected through in-depth interviews, direct field observations, and document review. Analysis is conducted using the Van Meter and Van Horn policy implementation framework, which emphasizes six key variables: policy standards and objectives, resource adequacy, characteristics of implementing organizations, inter-organizational communication, implementer disposition, and social, economic, and political conditions. The results reveal that although policy standards and objectives are well defined, program execution remains suboptimal due to limited resources and insufficient institutional support at the operational level. Consequently, stronger coordination among implementing actors and improved resource optimization are necessary to achieve more effective and sustainable agricultural development outcomes.*

Keywords: *Agricultural Facilities and Infrastructure; Agricultural Productivity; DKPP; Policy Implementation; Sukodadi Village.*

Abstrak. Sektor pertanian memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan pangan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan. Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian, Pemerintah Kabupaten Lamongan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian melaksanakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian yang berfokus pada penguatan infrastruktur produksi, seperti penyediaan alat dan mesin pertanian, pengembangan jaringan irigasi, serta perbaikan jalan usaha tani. Namun, dalam pelaksanaannya program ini masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran, distribusi sarana pertanian yang belum merata, ketergantungan pada sistem irigasi tadah hujan, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai, serta keterbatasan pendampingan oleh penyuluh pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn yang meliputi enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, komunikasi antar organisasi, disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun standar dan tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas, implementasi program belum berjalan optimal akibat keterbatasan sumber daya dan lemahnya dukungan struktural di tingkat pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga serta optimalisasi dukungan sumber daya agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

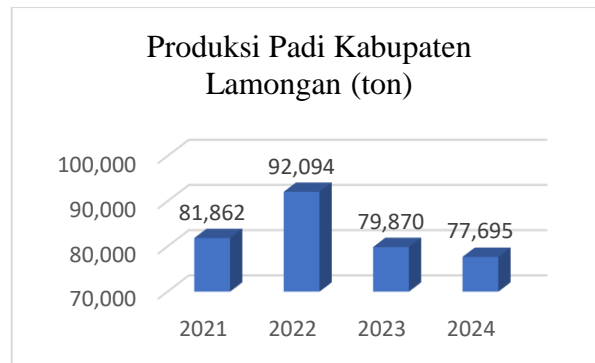
Kata kunci: Desa Sukodadi; DKPP; Implementasi Kebijakan; Produktivitas Pertanian; Sarpras Pertanian.

1. LATAR BELAKANG

Sektor pertanian menempati posisi penting dalam upaya menjaga ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung keberlanjutan perekonomian Indonesia. Sebagai negara yang memiliki basis agraris, keberhasilan pembangunan nasional sangat bergantung pada kinerja sektor pertanian, baik dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, membuka kesempatan kerja, maupun menjadi sumber mata pencaharian utama bagi penduduk di wilayah perdesaan. Data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto nasional, sehingga menegaskan perannya sebagai salah satu penopang utama perekonomian. Di samping itu, sektor pertanian memiliki keterkaitan yang erat dengan sektor ekonomi lainnya dalam sistem produksi nasional, yang tercermin dari tingginya keterkaitan ke depan (*forward linkage*). Kondisi tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai penyedia bahan baku dan input penting bagi berbagai sektor hilir, sehingga keberlanjutan dan penguatan sektor ini berpengaruh langsung terhadap stabilitas dan pertumbuhan ekonomi nasional (Kusuma et al., 2024).

Meskipun memiliki peran strategis, capaian produktivitas pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan sarana pendukung, penerapan teknologi yang belum merata, serta kualitas infrastruktur pertanian yang belum memadai menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi produktivitas (Ifani et al., 2024). Kondisi tersebut diperparah oleh kerentanan sektor pertanian terhadap perubahan iklim, alih fungsi lahan, serta ketidakefisienan dalam proses produksi dan distribusi. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan serta pengelolaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya air, menjadi langkah penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan pertanian (Ahmad, 2024).

Dalam lingkup regional, Provinsi Jawa Timur dikenal sebagai salah satu wilayah penyangga utama produksi padi nasional, dengan Kabupaten Lamongan sebagai salah satu daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap hasil produksi tersebut. Berdasarkan data produksi padi di Jawa Timur, Kabupaten Lamongan secara berkelanjutan menempati posisi strategis sebagai sentra produksi padi, sehingga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan dan stabilitas pangan di tingkat regional (BPS Provinsi Jawa Timur, 2025). Kondisi ini menunjukkan bahwa keberlangsungan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan sangat ditentukan oleh keberadaan kebijakan yang tepat serta ketersediaan infrastruktur pertanian yang memadai guna mendukung proses produksi secara optimal.



Gambar 1. Produksi Padi di Kabupaten Lamongan tahun 2021-2024.

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah Penulis)

Berdasarkan Gambar 1 yang menyajikan produksi padi di Kabupaten Lamongan pada periode 2021–2024, terlihat adanya fluktuasi produksi dengan kecenderungan menurun pada dua tahun terakhir. Produksi padi sempat mengalami peningkatan pada awal periode pengamatan, namun selanjutnya menunjukkan penurunan yang berlanjut hingga tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan bahwa meskipun Kabupaten Lamongan memiliki peran strategis sebagai salah satu daerah penghasil padi utama di Jawa Timur, stabilitas dan keberlanjutan produksi padi masih menghadapi tantangan. Oleh karena itu, penguatan sarana dan prasarana pertanian menjadi aspek penting yang perlu mendapat perhatian untuk menjaga konsistensi produksi dan mendukung ketahanan pangan daerah.

Upaya mempertahankan peran strategis tersebut menuntut adanya penguatan sarana dan prasarana pertanian. Infrastruktur seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi produksi dan keberlanjutan usaha tani (Fitriyah, 2021). Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, potensi sumber daya lahan dan tenaga kerja pertanian yang besar tidak dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani.

Upaya penguatan sektor pertanian di Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui kebijakan pembangunan daerah yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Landasan hukum tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026, yang menempatkan percepatan penyediaan infrastruktur dasar sebagai salah satu prioritas strategis pembangunan daerah. Keberadaan standar dan tujuan kebijakan yang dirumuskan secara jelas dalam dokumen perencanaan tersebut menjadi elemen krusial dalam menentukan efektivitas pelaksanaan pembangunan sektor pertanian di tingkat daerah, karena berfungsi sebagai acuan

utama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam proses implementasi kebijakan (Mandasari & Prabawati, 2020).

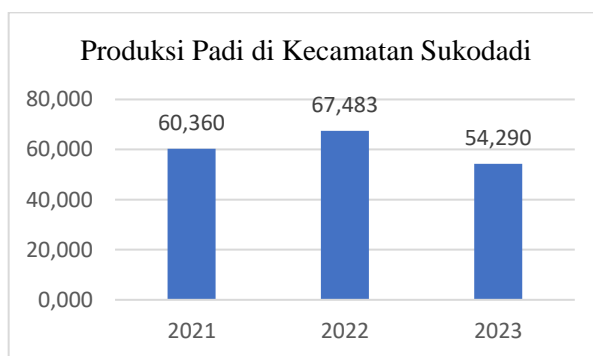
Sebagai bentuk penjabaran operasional dari kebijakan pembangunan daerah, Pemerintah Kabupaten Lamongan menetapkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024. Dokumen perencanaan tersebut menetapkan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian sebagai salah satu program prioritas yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Program ini diarahkan pada upaya penyediaan serta peningkatan sarana dan prasarana pertanian yang berfungsi sebagai instrumen kebijakan dalam mendorong peningkatan produktivitas, efektivitas, dan efisiensi kegiatan usaha tani di tingkat lokal (Ifani et al., 2024).

Pelaksanaan program tersebut didukung oleh alokasi anggaran yang mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur pertanian. Namun demikian, berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi program pengembangan sarana dan prasarana pertanian belum sepenuhnya mampu menghasilkan peningkatan efisiensi dan volume produksi secara berkelanjutan. Program berskala besar sering kali menghadapi kendala dalam aspek distribusi sarana, manajerial, dan keberlanjutan pemanfaatan (Fitriyah, 2021; Sa'adah, 2025).

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi dan Rahaju menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pertanian di tingkat kelompok tani tidak selalu berjalan secara optimal, meskipun telah didukung oleh kerangka kebijakan yang jelas. Melalui studi mengenai implementasi Program Intensifikasi Pertanian Sub Sektor Padi di Kabupaten Lamongan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, penelitian tersebut mengungkap bahwa produktivitas padi cenderung mengalami stagnasi akibat berbagai permasalahan dalam proses implementasi. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sarana produksi pertanian, lemahnya koordinasi antar pelaksana kebijakan, rendahnya intensitas kegiatan sosialisasi, serta belum maksimalnya peran penyuluhan dan pemanfaatan teknologi pertanian. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pertanian tidak hanya ditentukan oleh perumusan program semata, melainkan sangat bergantung pada kualitas pelaksanaan di tingkat lapangan, khususnya dalam hal dukungan sarana dan prasarana, efektivitas komunikasi antar aktor, serta pendampingan yang berkelanjutan kepada kelompok tani (Ahmadi & Rahaju, 2020).

Salah satu wilayah yang menjadi sasaran implementasi kebijakan pertanian tersebut adalah Kecamatan Sukodadi, yang memiliki peran strategis dalam mendukung produksi padi

di Kabupaten Lamongan. Wilayah ini didominasi oleh masyarakat yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertanian serta didukung oleh potensi lahan yang relatif subur (Shoimah et al., 2025; Melia & Sutedjo, 2021). Meskipun demikian, data produksi padi menunjukkan adanya fluktuasi bahkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun terakhir, yang mengindikasikan adanya permasalahan struktural dan implementatif dalam pengelolaan sektor pertanian di wilayah tersebut.



Gambar 2. Produksi Padi di Kecamatan Sukodadi tahun 2021-2023.

Sumber: Badan Pusat Statistik (Diolah Penulis)

Berdasarkan Gambar 2 yang menggambarkan produksi padi di Kecamatan Sukodadi pada periode 2021–2023, terlihat adanya fluktuasi produksi dengan kecenderungan menurun pada tahun terakhir pengamatan. Produksi padi sempat mengalami peningkatan pada tahun 2022, namun mengalami penurunan kembali pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas padi di Kecamatan Sukodadi belum stabil dan masih menghadapi berbagai kendala struktural. Fluktuasi tersebut mengindikasikan perlunya penguatan dukungan sarana dan prasarana pertanian agar produksi padi dapat lebih konsisten dan berkelanjutan.

Pada tingkat desa, Desa Sukodadi menunjukkan capaian produksi padi yang relatif lebih rendah dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Sukodadi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara potensi lahan pertanian dengan hasil produksi yang diperoleh. Rendahnya produksi tersebut dipengaruhi oleh ketergantungan lahan pada sistem irigasi tadah hujan, keterbatasan dan ketidakmerataan alat dan mesin pertanian, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai, serta minimnya pendampingan penyuluh pertanian (Fitriyah, 2021; Shoimah et al., 2025).

Kondisi di tingkat kecamatan dan desa tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah dirumuskan dalam dokumen perencanaan daerah dengan realitas implementasi di lapangan. Keterbatasan sarana dan prasarana pertanian serta belum optimalnya pemanfaatan program pembangunan berpotensi menghambat pencapaian target pembangunan pertanian daerah dan kesejahteraan petani (Fitriyah, 2021). Secara konseptual, kondisi ini

menegaskan pentingnya analisis mendalam terhadap faktor-faktor implementasi kebijakan, seperti karakteristik pelaksana, komunikasi antarorganisasi, serta kondisi sosial dan ekonomi yang melingkupinya (Mufidah & Tauran, 2024).

Implementasi kebijakan publik sering kali tidak berjalan optimal meskipun regulasi dan perencanaan sudah tersedia, karena berbagai kendala operasional dan pemahaman di lapangan (Panjaitan, 2021). Sebagaimana ditunjukkan dalam studi *Evaluasi Implementasi Kebijakan Sistem Repositori Ilmiah Nasional (RIN)*, meskipun tujuan sistem RIN dalam menyediakan interoperabilitas pengelolaan data penelitian terintegrasi telah tercapai, aspek kesadaran pengguna dan keberlanjutan implementasi masih belum optimal dan memerlukan perbaikan berkelanjutan. Temuan ini menggarisbawahi pentingnya tidak hanya memiliki kebijakan yang jelas secara normatif, tetapi juga memperhatikan faktor-faktor kontekstual dan dukungan implementor agar tujuan kebijakan dapat terlaksana secara efektif (Panjaitan, 2021).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan program, sehingga hasil penelitian diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berkelanjutan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual berbagai fenomena, peristiwa, atau kejadian yang sedang berlangsung dalam konteks tertentu (Juliansyah, 2012). Pendekatan kualitatif dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai proses implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan. Metode kualitatif dalam penelitian ini menerapkan pola pikir induktif, yaitu proses penarikan kesimpulan yang didasarkan pada hasil pengamatan terhadap fenomena sosial secara objektif dan partisipatif (Suyitno, 2018). Pendekatan ini dinilai tepat karena pelaksanaan program melibatkan berbagai aktor dengan karakteristik dan peran yang beragam, sehingga memerlukan penelusuran informasi yang bersifat kontekstual dan mendalam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder (Sugiyono, 2023). Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan yang ditentukan

menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pemilihan informan berdasarkan pertimbangan tertentu bahwa individu yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (Sugiyono, 2023). Informan penelitian meliputi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, petugas Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Sukodadi, pengurus kelompok tani dan gabungan kelompok tani (Gapoktan), serta petani di Desa Sukodadi sebagai penerima manfaat program. Adapun data sekunder diperoleh secara tidak langsung dari subjek penelitian melalui berbagai dokumen dan sumber tertulis yang telah tersedia (Silalahi, 2010). Data sekunder tersebut meliputi dokumen perencanaan dan pelaksanaan program sarana dan prasarana pertanian, laporan resmi instansi terkait, data produksi pertanian, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kebijakan pertanian di Kabupaten Lamongan.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi (Sugiyono, 2023). Wawancara digunakan sebagai teknik utama untuk memperoleh informasi secara mendalam melalui proses tanya jawab antara peneliti dan informan mengenai perencanaan, pelaksanaan, serta berbagai kendala dalam implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi (Bungin, 2007). Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian secara sistematis dengan memanfaatkan pancaindra, guna memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi sarana dan prasarana pertanian, seperti jaringan irigasi, alat dan mesin pertanian, serta kondisi jalan usaha tani (Sugiyono, 2017). Selain itu, teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan dan menelaah dokumen tertulis, arsip, laporan, serta data resmi yang relevan dengan fokus penelitian sebagai data pendukung (Arikunto, 2010).

Analisis data dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data Miles dan Huberman yang meliputi empat tahapan, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Miles & Huberman dalam Sugiyono, 2023). Pada tahap pengumpulan data, peneliti menghimpun seluruh data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang berkaitan dengan implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian. Tahap selanjutnya adalah reduksi data, yang dilakukan dengan cara menyeleksi, menyederhanakan, serta memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian agar proses analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dan sistematis (Sugiyono, 2023). Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk narasi deskriptif yang tersusun secara sistematis untuk memudahkan peneliti dalam mengidentifikasi pola, hubungan,

dan kecenderungan yang muncul dari data penelitian. Tahap akhir analisis data adalah penarikan kesimpulan, yang dilakukan melalui proses interpretasi dan verifikasi data secara berkesinambungan guna memastikan validitas serta kredibilitas temuan penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian diawali dengan proses koordinasi antar lembaga pelaksana, yaitu antara Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan Sukodadi, serta pemerintah desa. Koordinasi ini dilakukan untuk menyelaraskan kebijakan dan arah program daerah dengan kondisi serta kebutuhan riil yang dihadapi petani di tingkat lapangan. Melalui rapat koordinasi dan komunikasi yang dilakukan secara berkala, masing-masing aktor memiliki pembagian peran dan tanggung jawab yang jelas dalam tahap perencanaan maupun pelaksanaan program, sehingga kegiatan yang dilaksanakan tetap berada dalam koridor kebijakan yang telah ditetapkan.

Tahap selanjutnya adalah proses identifikasi kebutuhan sarana dan prasarana pertanian di tingkat desa. Identifikasi ini melibatkan BPP, pemerintah desa, kelompok tani, serta gabungan kelompok tani (Gapoktan) dengan fokus pada permasalahan utama yang dihadapi petani. Permasalahan tersebut antara lain keterbatasan alat dan mesin pertanian, kondisi jaringan irigasi yang belum optimal, serta akses jalan usaha tani yang masih kurang memadai. Hasil dari proses identifikasi ini kemudian digunakan sebagai dasar dalam menentukan jenis sarana dan prasarana pertanian yang akan disediakan melalui program.

Berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian menetapkan sasaran program serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan. Sasaran program meliputi petani, kelompok tani, dan Gapoktan yang dinilai paling membutuhkan dukungan sarana dan prasarana pertanian. Penetapan sasaran dilakukan dengan mempertimbangkan potensi wilayah, tingkat urgensi kebutuhan, serta kesesuaian dengan prioritas pembangunan sektor pertanian daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Pelaksanaan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian dilakukan melalui penyaluran sarana yang disertai dengan pengawasan serta pendampingan dalam penggunaannya. Sarana pertanian yang diberikan diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai dengan karakteristik komoditas dan kondisi lahan pertanian setempat. Dalam proses ini, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama BPP berperan memberikan arahan

teknis kepada petani serta memastikan bahwa sarana yang disalurkan digunakan secara tepat guna dan berkelanjutan.

Selain sarana pertanian, program ini juga mencakup penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian yang bersifat fisik dan berjangka panjang. Kegiatan prasarana meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur pendukung pertanian, seperti jaringan irigasi dan jalan usaha tani. Keberadaan prasarana tersebut berfungsi untuk mendukung kelancaran proses produksi dan distribusi hasil pertanian, sekaligus meningkatkan aksesibilitas petani terhadap lahan pertanian yang dikelola.

Sarana dan prasarana pertanian yang telah disediakan selanjutnya dimanfaatkan oleh petani sebagai penerima manfaat program. Namun, berdasarkan hasil penelitian, pemanfaatan sarana dan prasarana tersebut belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Beberapa petani masih mengalami kendala dalam penggunaan alat pertanian secara bersama-sama, sementara keterbatasan prasarana menyebabkan belum seluruh wilayah persawahan dapat terjangkau. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan program dengan realitas pemanfaatan di lapangan.

Tahap akhir dalam implementasi program adalah kegiatan pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian bersama BPP. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program serta tingkat pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian oleh petani. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa program telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka perencanaan yang ditetapkan, namun masih memerlukan perbaikan, khususnya dalam aspek pemerataan bantuan, penguatan pendampingan teknis, serta keberlanjutan pemanfaatan agar dampak program terhadap peningkatan produktivitas pertanian dapat tercapai secara lebih optimal.

Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Syahrudin (2018), terdapat enam variabel yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: (1) standar dan tujuan kebijakan, (2) ketersediaan sumber daya, (3) karakteristik organisasi pelaksana, (4) komunikasi antar organisasi yang terlibat, (5) disposisi implementor, dan (6) faktor sosial, ekonomi, serta politik yang berpengaruh dalam proses implementasi.

Standar dan Tujuan Kebijakan

Kejelasan standar dan tujuan kebijakan merupakan indikator awal yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik. Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa standar dan tujuan kebijakan berfungsi sebagai acuan utama bagi pelaksana dalam memahami capaian yang diharapkan serta arah pelaksanaan kebijakan (Syahrudin, 2018). Standar kebijakan berperan sebagai tolok ukur atau kriteria pelaksanaan, sedangkan

tujuan kebijakan mencerminkan kondisi ideal yang hendak dicapai. Perumusan standar dan tujuan yang jelas serta konsisten akan membantu mengarahkan pelaksanaan kebijakan dan mengurangi potensi perbedaan penafsiran di antara pelaksana maupun kelompok sasaran.

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian, keberadaan standar dan tujuan kebijakan menjadi aspek yang krusial mengingat program ini melibatkan berbagai aktor, mulai dari pemerintah daerah, perangkat teknis, hingga petani sebagai penerima manfaat. Program ini tidak semata-mata berorientasi pada penyaluran bantuan fisik, tetapi juga diarahkan untuk mendorong peningkatan produktivitas pertanian, efisiensi usaha tani, serta kesejahteraan petani. Oleh karena itu, standar kebijakan dibutuhkan sebagai pedoman dalam menentukan jenis kegiatan, mekanisme pelaksanaan, dan sasaran program, sementara tujuan kebijakan memberikan arah pembangunan pertanian yang ingin diwujudkan melalui program tersebut.

Secara normatif, standar kebijakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian telah ditetapkan melalui berbagai dokumen perencanaan daerah, seperti RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026, RKPD, serta Renstra dan Renja Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian. Dokumen-dokumen tersebut menjadi landasan pelaksanaan program sekaligus pedoman bagi pelaksana kebijakan dari tingkat daerah hingga lapangan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa standar kebijakan yang ada masih bersifat umum dan belum sepenuhnya dijabarkan ke dalam indikator teknis yang rinci dan terukur di tingkat desa.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan memaknai standar program sebagai pedoman umum untuk memastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Aparatur dinas dan penyuluh pertanian memandang standar kebijakan sebagai acuan dalam menentukan jenis kegiatan serta sasaran program, sedangkan petani sebagai penerima manfaat cenderung menilai keberhasilan program secara praktis, yaitu melalui ketersediaan sarana dan prasarana yang dapat langsung digunakan dalam kegiatan usaha tani. Perbedaan sudut pandang tersebut menunjukkan bahwa standar kebijakan belum dipahami secara seragam oleh seluruh aktor yang terlibat dalam pelaksanaan program.

Tujuan kebijakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian secara normatif diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Tujuan ini telah dirumuskan secara jelas dalam dokumen perencanaan daerah dan dipahami oleh pelaksana kebijakan sebagai bentuk dukungan pemerintah daerah terhadap kelancaran kegiatan usaha

tani. Namun, di tingkat petani, tujuan kebijakan lebih dimaknai sebagai bantuan langsung yang dapat meringankan beban kerja dan mempermudah proses pengolahan lahan.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara normatif standar dan tujuan kebijakan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian telah dirumuskan dengan jelas dan didukung oleh dasar regulasi yang kuat. Meskipun demikian, dalam implementasinya di Desa Sukodadi, standar kebijakan masih bersifat umum dan tujuan kebijakan belum sepenuhnya dipahami secara menyeluruh oleh masyarakat petani. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan penjabaran teknis serta penyampaian tujuan kebijakan secara lebih intensif agar pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah, selaras, dan efektif sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Ketersediaan Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya merupakan salah satu variabel krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi kebijakan menurut model Van Meter dan Van Horn. Sumber daya tidak hanya dimaknai sebagai dukungan anggaran, tetapi juga mencakup kecukupan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan kebijakan (Syahrudin, 2018). Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirumuskan dengan standar dan tujuan yang jelas berpotensi mengalami hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga tujuan kebijakan sulit tercapai secara optimal di tingkat lapangan.

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, sumber daya manusia yang terlibat meliputi aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, penyuluh pertanian pada Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Sukodadi, pemerintah desa, serta kelompok tani dan gabungan kelompok tani sebagai penerima manfaat program. Secara kelembagaan, pembagian peran dan tanggung jawab antar unsur pelaksana telah dirancang dengan cukup jelas sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah penyuluh pertanian yang tersedia belum sebanding dengan banyaknya kelompok tani yang harus didampingi. Kondisi tersebut menyebabkan kegiatan pendampingan, pembinaan, dan pengawasan di lapangan belum dapat dilakukan secara intensif dan merata, sehingga berpengaruh terhadap efektivitas pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian oleh petani.

Tabel 1. Jumlah Sumber Daya Manusia Unsur Pelaksana Program.

No	Unsur Pelaksana	Jumlah SDM
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan (Bidang Sarana dan Prasarana serta Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura)	14 orang
2	Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukodadi	5 orang
3	Gapoktan dan Poktan Desa Sukodadi	55 orang

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Sumber daya infrastruktur menjadi komponen penting lainnya dalam mendukung pelaksanaan program. Infrastruktur pertanian yang tersedia di Desa Sukodadi meliputi alat dan mesin pertanian seperti traktor dan pompa air, jaringan irigasi, sarana panen, serta jalan usaha tani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian infrastruktur tersebut telah tersedia, namun jumlah dan kondisinya belum sepenuhnya memadai. Traktor yang tersedia digunakan secara bergantian dan sebagian dalam kondisi lama, jaringan irigasi belum menjangkau seluruh lahan, serta sarana panen berupa combine harvester belum tersedia secara mandiri di tingkat desa.

Keterbatasan infrastruktur tersebut berdampak langsung pada efektivitas kegiatan pertanian. Pengolahan lahan dan pengairan harus dilakukan secara bergiliran, sementara proses panen masih bergantung pada penyewaan alat dari luar desa. Selain itu, kondisi jalan usaha tani yang belum memadai di beberapa titik turut menghambat distribusi alat dan pengangkutan hasil panen, terutama pada musim hujan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian belum sepenuhnya dapat berjalan secara efisien dan berkelanjutan.

Dari sisi sumber daya anggaran, Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian didukung oleh alokasi anggaran daerah yang dikelola oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan. Secara umum, dukungan anggaran sektor pertanian menunjukkan kecenderungan meningkat setiap tahunnya sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan daerah. Namun, alokasi anggaran tidak ditetapkan secara khusus per desa, melainkan disalurkan berdasarkan kebutuhan dan proposal kelompok tani, sehingga tidak seluruh kebutuhan sarana dan prasarana di Desa Sukodadi dapat terpenuhi dalam satu periode program.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi telah didukung oleh struktur sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran yang tersedia. Namun demikian, keterbatasan jumlah penyuluh pertanian, belum memadainya kondisi dan pemerataan infrastruktur, serta mekanisme penganggaran berbasis prioritas masih menjadi faktor pembatas

dalam pelaksanaan program. Kondisi ini menunjukkan bahwa penguatan kecukupan dan pemerataan sumber daya masih diperlukan agar implementasi program dapat berjalan lebih efektif dan selaras dengan tujuan peningkatan produktivitas serta kesejahteraan petani.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan, karena berkaitan dengan struktur organisasi, pembagian tugas, serta pola hubungan kerja antar lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan (Syahrudin, 2018). Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa organisasi pelaksana berperan sebagai penghubung utama antara kebijakan yang dirumuskan dengan kelompok sasaran, sehingga kejelasan karakteristik organisasi akan mempengaruhi efektivitas penerapan kebijakan di tingkat lapangan.

Dalam implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, organisasi pelaksana terdiri dari beberapa unsur yang saling berkaitan, yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan sebagai pelaksana utama, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukodadi sebagai pelaksana teknis di lapangan, serta gabungan kelompok tani dan kelompok tani sebagai penerima manfaat program. Struktur organisasi tersebut tersusun secara berjenjang dari tingkat kabupaten hingga tingkat desa, sehingga secara formal telah menyediakan kerangka kelembagaan yang mendukung pelaksanaan program.



Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Pelaksana Program.

Sumber: Olahan Penulis (2025)

Pembagian tugas dan fungsi antar organisasi pelaksana telah ditetapkan secara jelas sesuai dengan kewenangan masing-masing. DKPP berperan dalam perencanaan, penganggaran, penetapan kebijakan teknis, serta pengendalian program. BPP Kecamatan Sukodadi menjalankan fungsi pendampingan, pembinaan teknis, dan pengawasan pelaksanaan program di lapangan, sedangkan Gapoktan dan kelompok tani berperan sebagai pelaksana operasional dalam pemanfaatan sarana dan prasarana pertanian. Pembagian peran ini memungkinkan pelaksanaan program berjalan secara terstruktur dan terkoordinasi.

Dari sisi pengambilan keputusan, karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan pola yang cenderung sentralistik. Penetapan prioritas bantuan dan alokasi sarana prasarana pertanian berada di bawah kewenangan DKPP Kabupaten Lamongan, sementara BPP dan kelompok tani berperan sebagai pemberi masukan melalui pendampingan dan pengajuan proposal. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat ruang partisipasi dari pelaksana lapangan dan kelompok tani, keputusan akhir tetap ditentukan di tingkat dinas.

Berdasarkan hasil analisis, karakteristik organisasi pelaksana Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian secara struktural telah mendukung implementasi program melalui kejelasan struktur dan pembagian tugas antar organisasi. Namun demikian, karakter organisasi yang bersifat sentralistik dalam pengambilan keputusan membatasi peran kelompok tani dalam menentukan prioritas bantuan. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi tingkat kesesuaian antara kebutuhan riil petani dengan bantuan sarana dan prasarana yang diterima di tingkat lapangan.

Komunikasi Antar Organisasi

Komunikasi antar organisasi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan implementasi kebijakan karena berkaitan langsung dengan proses penyampaian informasi, kejelasan instruksi, serta efektivitas koordinasi antar pelaksana kebijakan (Klijn & Koppenjan, 2020). Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa komunikasi yang berjalan secara efektif sangat dibutuhkan agar substansi kebijakan dapat dipahami secara seragam dan dilaksanakan secara konsisten oleh seluruh aktor yang terlibat, sehingga tujuan kebijakan dapat dicapai secara optimal (Syahrudin, 2018).

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, mekanisme komunikasi antar organisasi melibatkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukodadi, serta Gapoktan dan kelompok tani sebagai pihak penerima manfaat. Pola komunikasi yang digunakan bersifat hierarkis dan berjenjang, di mana DKPP menyampaikan kebijakan, petunjuk teknis, serta arahan pelaksanaan kepada BPP. Selanjutnya,

BPP berperan sebagai penghubung yang meneruskan informasi tersebut kepada kelompok tani melalui kegiatan pendampingan, sosialisasi, dan pertemuan di tingkat lapangan. Pola komunikasi ini dimaksudkan agar informasi kebijakan dapat dipahami secara lebih teknis dan kontekstual sesuai dengan kondisi serta kebutuhan petani di wilayah setempat.

Bentuk komunikasi antar organisasi tidak hanya dilakukan melalui penyampaian informasi, tetapi juga melalui koordinasi pada berbagai tahapan pelaksanaan program. Koordinasi antara DKPP dan BPP dilakukan melalui rapat perencanaan, evaluasi, serta komunikasi kedinasan untuk membahas pelaksanaan program dan penanganan kendala teknis. Sementara itu, koordinasi antara BPP dan kelompok tani dilakukan secara lebih intensif melalui pendampingan rutin di lapangan, yang menjadi sarana utama dalam menjelaskan mekanisme program dan pemanfaatan sarana prasarana pertanian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi antar organisasi secara umum telah berjalan dengan cukup jelas dan terstruktur. Informasi program dapat diterima oleh kelompok tani melalui peran penyuluh pertanian sebagai penghubung utama di tingkat lapangan. Namun demikian, keterbatasan jumlah penyuluh menyebabkan intensitas komunikasi belum dapat dilakukan secara merata kepada seluruh kelompok tani, sehingga penyampaian informasi dan koordinasi masih bersifat situasional dan bergantung pada momen tertentu.

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar organisasi pelaksana Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian telah mendukung implementasi program melalui alur komunikasi yang jelas dan terkoordinasi. Meskipun demikian, keterbatasan intensitas komunikasi di tingkat kelompok tani berpotensi mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Oleh karena itu, penguatan frekuensi dan jangkauan komunikasi antar organisasi masih diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berjalan lebih konsisten dan merata di tingkat lapangan.

Disposisi Implementor

Disposisi pelaksana merupakan salah satu variabel kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2018) menjelaskan bahwa disposisi pelaksana mencerminkan sikap, tingkat penerimaan, serta komitmen para implementor dalam melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana yang mendukung dan responsif akan mendorong pelaksanaan kebijakan berjalan secara efektif, sedangkan disposisi yang kurang kuat berpotensi menjadi penghambat pencapaian tujuan program, meskipun kebijakan telah dirumuskan secara baik dan didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai.

Dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, disposisi pelaksana pada tingkat Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Lamongan menunjukkan tingkat penerimaan dan komitmen yang relatif baik terhadap pelaksanaan program. DKPP memandang program ini sebagai instrumen strategis dalam mendukung pengembangan sektor pertanian, baik melalui penyediaan alat dan mesin pertanian maupun melalui dukungan penunjang lainnya, seperti bantuan benih padi, subsidi pupuk, serta pelaksanaan kegiatan pelatihan dan pendampingan bagi petani. Sikap tersebut mencerminkan adanya komitmen normatif dari pelaksana kebijakan untuk menjalankan program sesuai dengan tujuan pembangunan pertanian yang telah ditetapkan.

Disposisi pelaksana juga tercermin dari cara DKPP menyikapi usulan bantuan yang diajukan oleh kelompok tani. Meskipun tidak seluruh proposal dapat direalisasikan akibat keterbatasan anggaran dan prioritas program, pelaksana tetap menunjukkan sikap terbuka dengan menampung seluruh usulan sebagai bahan pertimbangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksana tidak bersikap menolak kebijakan secara substantif, melainkan melakukan seleksi secara administratif dan teknis sesuai dengan kapasitas program yang tersedia.

Di tingkat lapangan, disposisi pelaksana terlihat dari sikap penyuluh pertanian BPP Kecamatan Sukodadi yang menunjukkan komitmen dalam mendampingi petani. Penyuluh berupaya memberikan bimbingan terkait pemanfaatan sarana prasarana, penggunaan benih, serta penerapan teknis budidaya, meskipun harus menghadapi keterbatasan jumlah penyuluh dan luas wilayah pendampingan. Hal ini menunjukkan adanya kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan secara maksimal dalam keterbatasan yang ada.

Namun demikian, disposisi pelaksana dalam penanganan permasalahan teknis seperti serangan hama tanaman cenderung bersifat responsif atau kuratif. Bantuan dan intervensi dari pelaksana umumnya diberikan setelah serangan hama dinilai cukup parah, sementara pada tahap awal petani masih dituntut untuk melakukan pengendalian secara mandiri. Pola ini mencerminkan kehati-hatian pelaksana dalam penggunaan sumber daya, tetapi di sisi lain menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kebijakan belum sepenuhnya diarahkan pada pendekatan yang preventif dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa disposisi pelaksana dalam Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi secara umum bersifat positif dan mendukung implementasi kebijakan. Sikap penerimaan dan komitmen pelaksana, baik di tingkat dinas, penyuluh, maupun kelompok tani, menjadi faktor pendukung pelaksanaan program. Namun, keterbatasan intensitas pendampingan serta

pendekatan pelaksanaan yang masih responsif menunjukkan bahwa disposisi pelaksana yang positif masih perlu diperkuat melalui strategi yang lebih preventif dan berkelanjutan agar tujuan program dapat tercapai secara optimal.

Faktor Sosial, Ekonomi, dan Politik

Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik merupakan faktor eksternal yang turut memengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan. Van Meter dan Van Horn dalam Syahrudin (2018) menyatakan bahwa kondisi eksternal tersebut dapat berperan sebagai faktor pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaan kebijakan, meskipun kebijakan telah dirumuskan secara jelas serta didukung oleh struktur organisasi dan ketersediaan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, kajian terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan politik menjadi penting untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai konteks implementasi kebijakan di lapangan.

Ditinjau dari aspek sosial, kondisi masyarakat Desa Sukodadi relatif mendukung pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian. Struktur sosial masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani dan tergabung dalam kelompok tani serta gabungan kelompok tani membentuk pola interaksi yang bersifat kolektif. Nilai-nilai sosial seperti gotong royong dan kebiasaan bermusyawarah masih kuat dan berfungsi sebagai modal sosial dalam pemanfaatan bantuan secara bersama-sama. Kondisi ini berkontribusi dalam meminimalkan potensi konflik yang dapat timbul akibat keterbatasan sarana dan prasarana pertanian, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih kondusif.

Tingkat penerimaan masyarakat terhadap program juga tergolong baik. Petani tidak menunjukkan resistensi terhadap kebijakan penyediaan sarana dan prasarana pertanian, melainkan berupaya menyesuaikan diri dengan mekanisme penggunaan bantuan yang telah ditetapkan. Bantuan alsintan, benih, dan pendampingan diterima secara positif serta dikelola melalui kesepakatan kelompok, yang menunjukkan adanya keselarasan antara kebijakan dan kondisi sosial masyarakat setempat.

Dari sisi ekonomi, lingkungan ekonomi masyarakat Desa Sukodadi masih menunjukkan keterbatasan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Produksi padi yang relatif rendah, pola tanam yang hanya dapat dilakukan dua kali setahun, serta belum optimalnya jaringan irigasi menyebabkan pendapatan petani belum meningkat secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan tingginya biaya usaha tani, khususnya biaya sewa alat panen dari luar desa akibat ketiadaan combine harvester milik kelompok tani.

Keterbatasan lingkungan ekonomi tersebut menyebabkan dampak program belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan kesejahteraan petani. Meskipun bantuan sarana dan

prasarana pertanian telah disalurkan, hasil yang diperoleh masih sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti ketersediaan air, kondisi infrastruktur, dan biaya produksi. Dengan demikian, lingkungan ekonomi masyarakat masih menjadi faktor pembatas dalam pencapaian tujuan program secara maksimal.

Dari aspek politik, lingkungan politik dalam pelaksanaan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian dapat dikatakan relatif kondusif. Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan menunjukkan dukungan yang konsisten terhadap sektor pertanian melalui penganggaran dan keberlanjutan program dalam dokumen perencanaan daerah. Dukungan ini memberikan legitimasi dan kepastian kebijakan bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian dalam melaksanakan program secara berkelanjutan.

Selain itu, dukungan politik di tingkat desa juga terlihat cukup baik. Pemerintah Desa Sukodadi bersikap kooperatif dalam mendukung aspek administratif dan fasilitasi kegiatan program, meskipun tidak terlibat langsung sebagai pelaksana utama. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan sosial dan politik cenderung mendukung implementasi program, sementara lingkungan ekonomi masih menjadi faktor pembatas yang mempengaruhi efektivitas pencapaian tujuan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian di Desa Sukodadi, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan dengan menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, dapat disimpulkan bahwa program ini merupakan kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam mendukung pembangunan sektor pertanian. Program tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani. Secara umum, pelaksanaan program telah memberikan manfaat nyata bagi petani, khususnya dalam menunjang kegiatan pengolahan lahan dan budidaya pertanian, namun dampak yang dihasilkan belum sepenuhnya optimal. Ditinjau dari indikator standar dan tujuan kebijakan, implementasi program telah memiliki dasar regulasi dan dokumen perencanaan daerah yang jelas, tetapi standar kebijakan masih bersifat umum dan belum sepenuhnya dijabarkan ke dalam indikator teknis yang terukur di tingkat lapangan, serta terdapat perbedaan pemaknaan tujuan kebijakan antara pelaksana dan petani. Dari sisi sumber daya, ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran

belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan riil petani, terutama akibat keterbatasan jumlah penyuluh dan sarana prasarana pertanian. Karakteristik organisasi pelaksana menunjukkan adanya struktur dan pembagian tugas yang jelas, namun pola pengambilan keputusan yang cenderung sentralistik membatasi partisipasi kelompok tani. Komunikasi antar organisasi telah berjalan secara struktural dan berjenjang, tetapi intensitas pendampingan di tingkat kelompok tani belum merata. Sementara itu, disposisi pelaksana menunjukkan komitmen yang cukup baik, meskipun pendekatan implementasi masih bersifat responsif dan belum berorientasi jangka panjang. Di sisi lain, kondisi sosial dan politik masyarakat relatif kondusif dan mendukung pelaksanaan program, namun kerentanan ekonomi petani menyebabkan dampak program terhadap peningkatan kesejahteraan belum sepenuhnya tercapai secara optimal.

Saran

Berdasarkan simpulan tersebut, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat standar teknis program dengan merumuskan indikator operasional yang lebih jelas dan terukur serta meningkatkan sosialisasi tujuan kebijakan agar dipahami secara seragam oleh pelaksana dan petani. Penguatan sumber daya manusia, khususnya melalui penambahan penyuluh pertanian atau pengembangan mekanisme pendampingan alternatif, perlu dilakukan agar pendampingan kepada kelompok tani dapat berlangsung secara merata dan berkelanjutan. Selain itu, dukungan terhadap infrastruktur pertanian seperti alsintan, jaringan irigasi, sarana panen, dan jalan usaha tani perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan wilayah. Pelibatan kelompok tani dan Gapoktan dalam proses perencanaan serta penentuan prioritas bantuan juga perlu diperkuat untuk memastikan kesesuaian bantuan dengan kebutuhan riil petani. Terakhir, pendekatan implementasi kebijakan perlu diarahkan secara lebih preventif dan berkelanjutan agar manfaat program dapat dirasakan dalam jangka panjang dan berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan petani.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada dosen Program Studi S1 Ilmu Administrasi Negara Universitas Negeri Surabaya, terutama Bapak Tauran, S.Sos., M.Soc.Sc. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama proses penulisan. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Tjitjik Rahaju, M.Si. dan Ibu Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen penguji yang telah memberikan saran dan

evaluasi konstruktif demi penyempurnaan artikel ini. Selain itu, penulis menyampaikan apresiasi kepada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Lamongan, UPT Pertanian Kecamatan Sukodadi, serta Gapoktan dan para petani di Desa Sukodadi yang telah membantu dan memfasilitasi proses pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, I. M. (2024). Air terkelola, panen terjaga: Adaptasi petani di lahan karst dalam menghadapi perubahan iklim. *Endogami: Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 7(2), 301–315.
- Ahmadi, F. F., & Rahaju, T. (2020). Implementasi program intensifikasi pertanian sub sektor padi pada GAPOKTAN Mukti Jaya Desa Sidomukti Kecamatan Kembangbahu Kabupaten Lamongan. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(2).
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.
- Fitriyah, L. (2021). Efektivitas dan keberlanjutan program pengembangan sarana prasarana pertanian di Kabupaten Lamongan. *Cakrawala: Jurnal Litbang Kebijakan*, 15(1). <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v15i1.373>
- Ifani, I., Sartiyah, S., & Ernawati, E. (2024). The effect of agricultural infrastructure policies on rice production in Indonesia. *International Journal of Social Science, Education, Communication and Economics*, 3(4), 1323–1330.
- Juliansyah, N. (2012). *Metodologi penelitian skripsi, tesis dan disertasi karya ilmiah*. Kencana Prenada Media.
- Klijn, E. H., & Koppenjan, J. F. M. (2020). *Governance networks in the public sector*. Routledge.
- Kusuma, A. C., Fadilah, Z. R., Kamal, R. B., Syukria, I., & Budiasih, B. (2024). Keterkaitan dan kontribusi sektor pertanian di Indonesia: Analisis input-output. *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(2), 643–657.
- Mandasari, O. P., & Prabawati, I. (2020). Implementasi kebijakan pengembangan kawasan agropolitan di Desa Wedi Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. *Publika*, 8(1).
- Melia, N. N., & Sutedjo, A. (2021). *Kajian geografis mengenai produktivitas usaha tani padi di Kabupaten Lamongan*. Universitas Negeri Surabaya.
- Mufidah, N. H., & Tauran. (2024). Implementasi kebijakan bantuan laptop gratis untuk meningkatkan pembelajaran digital tingkat sekolah dasar negeri di Kelurahan Madiun Lor Kota Madiun. *Publika*, 12(1), 172–181. <https://doi.org/10.26740/publika.v12n1.p172-181>
- Panjaitan. (2021). Evaluasi implementasi kebijakan Sistem Repositori Ilmiah Nasional (RIN). *Journal of Public Sector Innovations (JPSI)*, Universitas Negeri Surabaya. <https://doi.org/10.26740/jpsi.v5n2.p80-89>

Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021–2026.

Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2024.

Sa'adah, H. M. (2025). Implementasi kebijakan pertanian padi di Kabupaten Lamongan tahun 2011–2023. *Avatara*, 16(2), 1–12.

Shoimah, S., Sholikin, A., Trivena, S. M., Himma, F., & Putri, W. A. (2025). Mendorong usaha tani berkelanjutan melalui kolaborasi edukasi pupuk organik di Sukodadi. *Penamas: Journal of Community Service*, 5(2), 343–351. <https://doi.org/10.53088/penamas.v5i2.1918>

Silalahi, U. (2010). *Metode penelitian sosial*. PT Refika Aditama.

Sugiyono. (2023). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.

Suyitno, A. T. (2018). *Metode penelitian kualitatif*. Akademia Pustaka.

Syahrudin. (2018). *Implementasi kebijakan publik: Konsep, teori, dan studi kasus*. Nusa Media.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.